

# REKOMENDASI POLIO



DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA  
2024

## 1. Pendahuluan

### a. Latar belakang penyakit

Virus Polio adalah Virus yang termasuk dalam golongan Human Enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus Polio terdiri dari 3 strain yaitu strain-1 (Brunhilde), strain-2 (Lansig), dan strain-3 (Leon), termasuk family Picornaviridae. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada cornu anterior dari sumsum tulang belakang akibat infeksi virus.

Kebanyakan orang yang terinfeksi (90%) tidak mengalami gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain gejala awal yaitu Demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher dan nyeri di tungkai.

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam menangani wabah virus polio ini. Dengan adanya resolusi WHO dan program The Global Polio Eradication Initiative pada tahun 1988, Indonesia telah melaksanakan program imunisasi nasional polio selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 1995, 1996 dan 1997, serta telah berhasil memberantas virus polio di Indonesia sejak tahun 1996. Namun pada 13 Maret 2005 ditemukan kasus polio pertama di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Sehingga dalam kurun waktu 2005 sampai awal 2006, kasus polio tersebut berkembang menjadi KLB yang menyerang 305 orang, dan tersebar di 47 kabupaten/ kota di 10 provinsi di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, tingkat vaksinasi anak secara global terhadap polio dan program vaksinasi lainnya termasuk di Indonesia, mengalami penurunan yang drastis akibat dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini dapat berakibat pada penyebaran kembali virus polio di beberapa negara termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, cakupan vaksinasi polio harus tetap tinggi dan upaya pengawasan perlu terus ditingkatkan. Penemuan kasus polio baru-baru ini, termasuk di negara-negara yang selama beberapa dekade tidak ditemukan lagi kasus polio, merupakan peringatan kuat bahwa setiap negara tetap berisiko mengalami munculnya kembali kasus polio sampai virus polio dieradikasi di seluruh dunia.

Imunisasi merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan kasus polio. Upaya untuk meningkatkan capaian dan cakupan imunisasi perlu terus ditingkatkan. Selain itu pemerintah perlu memastikan sistem surveilans kesehatan berjalan secara optimal, dan peningkatan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui kerjasama para pemangku kepentingan termasuk peran aktif para tokoh masyarakat untuk berkomitmen guna terus mempertahankan status bebas polio ini di Indonesia.

Data Surveilans AFP dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Pada tahun 2022 memiliki nilai AFP rate > 2 /100.000 Anak usia <15 Tahun (3.07), Pada tahun 2023 AFP rate > 2 /100.000 Anak usia <15 Tahun (4.98) dan saat ini Tahun 2024 AFP Rate Kab. Bulukumba > 2/100.000 Anak < 15 Tahun (3.15)

### b. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit Polio.
2. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di daerah Kabupaten.
3. Dapat di jadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.
4. Dapat menjadi dasar perencanaan Penganggaran tahun berikutnya untuk kewaspadaan penyakit infeksi emerging disease (Polio).

## 2. Hasil Pemetaan Risiko

### a. Penilaian ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/ sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Bulukumba, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

No.	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Karakteristik Penyakit	Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli)	T	13.55	13.55
2	Pengobatan	Pengobatan (literatur/tim ahli)	T	1.91	1.91
3	Metode Penanggulangan Penularan Penyakit	Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli)	S	10.50	1.05
4	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat	Pencegahan Penularan Penyakit Perorangan (literatur/tim ahli)	A	13.16	0.01
5	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli)	S	13.95	1.40
6	Risiko importasi	Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli)	T	8.47	8.47
7	Risiko importasi	Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia	S	8.47	0.85
8	Risiko penularan setempat	Risiko penularan setempat	A	8.71	0.01
9	Dampak wilayah	Dampak wilayah (periode KLB)	S	6.01	0.60
10	Dampak ekonomi	Dampak ekonomi saat terjadi keadaan KLB	R	6.81	0.07
11	Dampak ekonomi	Dampak ekonomi saat tidak terjadi KLB (AFP)	R	5.22	0.05
12	Dampak Sosial	Perhatian media	A	3.24	0.00

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Ancaman Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 3 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

1. Subkategori Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli), alasan karena sudah menjadi ketetapan tim ahli.
2. Subkategori Pengobatan (literatur/tim ahli), alasan karena sudah menjadi ketetapan tim ahli.
3. Subkategori Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli), alasan karena sudah menjadi ketetapan tim ahli.

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 4 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

1. Subkategori Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli), alasan karena sudah menjadi ketetapan tim ahli.

2. Subkategori Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli), alasan karena sudah menjadi ketetapan tim ahli.
3. Subkategori Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia, alasan karena sudah menjadi ketetapan tim ahli.
4. Subkategori Dampak wilayah (periode KLB), alasan karena secara risiko di wilayah Indonesia terdapat kasus yang menjadi ancaman di wilayah kabupate/kota di Indonesia.

**b. Penilaian Kerentanan**

Penetapan nilai risiko Kerentanan Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

No.	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBO T (B)	INDEX (NXB)
1	Karakteristik Penduduk	Kepadatan Penduduk	T	13.64	13.64
2	Ketahanan Penduduk	% cakupan imunisasi polio 4	S	27.99	2.80
3	Ketahanan Penduduk	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS)	R	31.10	0.31
4	Karakteristik Lingkungan Berisiko	% sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat	S	20.74	2.07
5	Transportasi Antar Kab/Kota/ Provinsi	Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi	T	6.53	6.53

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kerentanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 2 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

1. Subkategori Kepadatan Penduduk, alasan karena kepadatan penduduk dengan nilai 13.64 merupakan kategori tinggi penularan penyakit atau tingkat keterpaparan yang tinggi
2. Subkategori Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi, alasan karena terdapatnya transportasi antar wilayah kabupaten dalam provinsi dengan frekuensi yang tinggi atau setiap hari.

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 2 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

1. Subkategori % cakupan imunisasi polio 4, alasan Karena persentase cakupan imunisasi polio masih di bawah target nasional >90 % dan hanya di capai sebesar 71,9 %. Terjadinya penurunan capaian disebabkan oleh kunjungan Polio 4 tidak memenuhi target karena terdapat beberapa kasus KIPI sehingga para orang tua tidak lagi melengkapi dosis polio 4 nya.
2. Subkategori % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat, alasan karena terdapat sarana air minum yang belum dilakukan pemriksaan sebesar 98,9 % dan yang belum memunuhi syarat dari yang dilakukan pemeriksaan sebesar 33 %.

### c. Penilaian kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

No.	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Kebijakan publik	Kebijakan publik	R	3.52	0.04
2	Kelembagaan	Kelembagaan	T	3.52	3.52
3	Program pencegahan dan pengendalian	Program imunisasi	S	7.75	0.78
4	Program pencegahan dan pengendalian	Pengobatan massal (PIN Polio)	S	2.37	0.24
5	Program pencegahan dan pengendalian	Pengendalian lingkungan dan Perilaku	S	3.15	0.32
6	Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE	Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE	S	6.66	0.67
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	R	3.40	0.03
8	Surveilans	Surveilans (SKD)	R	8.89	0.09
9	Surveilans	Sasaran deteksi dini kasus Polio (human diseases surveillance)	T	7.06	7.06
10	Surveilans	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas)	S	9.08	0.91
11	Surveilans	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (RS)	T	11.20	11.20
12	Surveilans	Surveilans AFP	T	10.10	10.10
13	PE dan penanggulangan KLB	PE dan penanggulangan KLB	R	12.06	0.12
14	Kapasitas Lab	Kapasitas Laboratorium	S	1.75	0.18
15	Promosi	Media Promosi Kesehatan	T	9.48	9.48

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kapasitas Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 0 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Abai, yaitu :

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 4 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Subkategori Kebijakan publik, alasan karena tidak terdapat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah maupun surat edaran hanya menjadi perhatian di lingkup internal bidang terkait
2. Subkategori Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alasan karena terdapat tim pengendalian kasus polio yang belum terlatih dan memiliki sertifikat.

3. Subkategori 8a. Surveilans (SKD), alasan karena terdapat pelaksana skdr yang belum bersertifikat pelatihan, dan penyebarluasan media tidak melakukan publikasi.
4. Subkategori PE dan penanggulangan KLB, alasan karena terdapat Anggota TIM TGC yang belum memiliki sertifikat pelatihan.

**d. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)**

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Polio didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik resiko Kabupaten Bulukumba dapat di lihat pada tabel 4.

Provinsi	Sulawesi Selatan
Kota	Bulukumba
Tahun	2025

<b>RESUME ANALISIS RISIKO POLIO</b>	
Ancaman	27.97
Kerentanan	25.35
Kapasitas	44.74
<b>RISIKO</b>	<b>15.85</b>
<b>Derajat Risiko</b>	<b>SEDANG</b>

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Polio Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Polio di Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2024, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 27.97 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 25.35 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 44.74 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 15.85 atau derajat risiko SEDANG

**3. Rekomendasi**

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELIN E	KET
1	KEBIJAKAN	Membuat Surat edaran Bupati kepada seluruh pemilik Sarana Air Minum terkait kepatuhan pemeriksaan.	Pj. Pengawasan Kualitas Air di Dinkes	Agustus 2025	
2	DAMPAK	Mengusulkan Anggaran pengadaan Reagen Pemriksaan sarana air minum dan pengiriman sampel ke Laboratorium Rujukan	Pj. Pengawasan Kualitas Air di Dinkes	Agustus 2025	
3	Pelaksanaan	Melaksanakan sosialisasi Rutin imunisasi dan KIPI di daerah rendah cakupan imunisasi Polio	Pj. Imunisasi	September 2025	

4	DAMPAK	Mengusulkan Anggaran Sosialisasi Lintas sektor dan Monitoring Bulanan Program Imunisasi	Pj. Imunisasi	Agustus 2025	
5	SURVEILANS	Melaksanakan Pelatihan bagi petugas surveilans di Puskesmas dan RS	Pj. Surveilans	Agustus 2025	
6	SURVEILANS	Mengusulkan pengadaan Perangkat PC/Laptop operasional bagi petugas surveilans di Puskesmas	Pj. Surveilans	Agustus 2025	
7	SURVEILANS	Mengusulkan dana pembelian pulsa untuk pelaporan SKDR serta anggaran website publikasi penyebarluasan informasi	Pj. Surveilans	Agustus 2025	
8	KEBIJAKAN	Membuat Surat edaran Bupati kepada seluruh pemilik Sarana Air Minum terkait kepatuhan pemeriksaan.	Pj. Program STBM	Agustus 2025	

Bulukumba , 10 Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba



**Dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked., M.Kes**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19750712 200212 1 009

## TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN REKOMENDASI DARI HASIL ANALISIS RISIKO PENYAKIT POLIO

Langkah pertama adalah MERUMUSKAN MASALAH

### 1. MENETAPKAN SUBKATEGORI PRIORITAS

Subkategori prioritas ditetapkan dengan langkah sebagai berikut:

- Memilih maksimal lima (5) subkategori pada setiap kategori kerentanan dan kapasitas
- Lima sub kategori kerentanan yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kerentanan tertinggi (urutan dari tertinggi: Tinggi, Sedang, Rendah, Abai) dan bobot tertinggi
- Lima sub kategori kapasitas yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kapasitas terendah (urutan dari terendah: Abai, Rendah, Sedang, Tinggi) dan bobot tertinggi

### 2. Menetapkan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti

- Dari masing-masing lima Subkategori yang dipilih, ditetapkan masing-masing maksimal tiga subkategori dari setiap kategori kerentanan dan kapasitas.
- Pemilihan tiga subkategori berdasarkan bobot tertinggi (kerentanan) atau bobot terendah (kapasitas) dan/atau pertimbangan daerah masing-masing.
- Untuk penyakit MERS, subkategori pada kategori kerentanan tidak perlu ditindaklanjuti karena tindak lanjutnya akan berkaitan dengan kapasitas.
- Kerentanan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi.

Tabel Isian :

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Kepadatan Penduduk	13.64	T
2	Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi	6.53	T
3	% cakupan imunisasi polio 4	27.99	S
4	% sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat	20.74	S
5	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS)	31.10	R

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Kepadatan Penduduk	13.64	T
2	Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi	6.53	T
3	% cakupan imunisasi polio 4	27.99	S

**Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kapasitas**

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	PE dan penanggulangan KLB	12.06	R
2	8a. Surveilans (SKD)	8.89	R
3	Kebijakan publik	3.52	R
4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.40	R
5	8c. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas)	9.08	S

**Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kapasitas**

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Kebijakan publik	3.52	R
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.40	R
3	8a. Surveilans (SKD)	8.89	R

**3. Menganalisis inventarisasi masalah dari setiap subkategori yang dapat ditindaklanjuti**

- a. Memilih minimal satu pertanyaan turunan pada subkategori prioritas dengan nilai jawaban paling rendah/buruk
- b. Setiap pertanyaan turunan yang dipilih dibuat inventarisasi masalah melalui metode 5M (man, method, material, money, dan machine)

**Kerentanan**

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	Kepadatan Penduduk	Membutuhkan jumlah kesesuaian tenaga berdasarkan analisis kebutuhan tenaga	Pelaksanaan SOP di Semua Pelayanan belum sesuai urutan Prioritas	Kesesuaian ruangan untuk pelaksanaan isolasi dan karantina berdasarkan jumlah penduduk (BOR sesuai standar)	Tidak tersedianya anggaran khusus penanggulangan KLB untuk penyakit Polio	Keterbatasan Perangkat PC yang digunakan dalam merespon Kejadian Luar Bisa di fasilitas pelayanan kesehatan
2	Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi	Kebutuhan tenaga yang terlatih dalam pemantauan orang dari daerah terjangkau	Pelaksanaan SOP di Pintu Masuk Pelabuhan belum mendapatkan notifikasi	Belum berjalan pelaporan yang bersumber dari pelaku perjalanan karena belum tersedia perangkat khusus pelaporan	Tidak tersedianya anggaran khusus penanggulangan	Keterbatasan Perangkat PC yang digunakan dalam merespon Kejadian Luar Bisa di fasilitas

		melalui transportasi darat	(Wilker BKK Maksassar Pelabuhan Bira)	orang dengan gejala memasuki wilayah kabupaten	KLB untuk penyakit Polio	pelayanan kesehatan
3	% cakupan imunisasi polio 4	Masih ada masyarakat dengan menolak program imunisasi.  Masih ada kekhawatiran masyarakat terkait Halal dan haram serta KIPI tentang imunisasi.  Terbatasnya tenaga pelapor di Aplikasi ASyik	Belum Maksimalnya sosialisasi di masyarakat termasuk kelompok-kelompok yang menolak.  Belum maksimalnya investigasi Kasus KIPI yang menimbulkan Kekhawatiran masyarakat	Kurangnya anggaran sosialisasi untuk pelaksanaan program imunisasi	Tidak tersedianya anggaran khusus penanggulangan KLB untuk penyakit Polio	Aplikasi ASyik sering eror sehingga sulit melakukan pelaporan

### Kapasitas

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	Kebijakan publik	Belum tersedianya aturan lokal untuk peningkatan cakupan imunisasi Polio. Pelaksanaan SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan imunisasi Polio belum sepenuhnya dijalankan	Belum tersedianya SOP yang mengatur pelaksanaan SKB 4 Menteri pelaksanaan imunisasi sebagai bagian pengendalian Polio	Tidak tersedianya TIM Pengendalian Polio Lintas sektor dan hanya lingkup Dinas Kesehatan	Dukungan kebijakan anggaran pengendalian Polio belum Maksimal	Tidak tersedianya rapat koordinasi lintas sektor dan sistem monitoring dan evaluasi lintas sektor
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tim pengendalian kasus Polio di faskes sudah sesuai pedoman, tetapi ada anggota tim yang belum terlatih	Tidak terselenggaranya rapat koordinasi internal TIM dengan Tim pengendalian	Tidak adanya dana yang tersedia untuk Pelatihan TIM Penanggulangan PIE di RS dan	Tim pengendalian kasus Polio di faskes sudah sesuai pedoman, tetapi ada	Tidak terselenggaranya rapat koordinasi internal TIM dengan Tim pengendalian kasus polio di

			kasus polio di dinas Kesehatan dan tidak tersedianya pelatihan bagi tim RS untuk penanggulangan PIE (POLIO)	Rapat rapat koordinasi	anggota tim yang belum terlatih	dinas Kesehatan dan tidak tersedianya pelatihan bagi tim RS untuk penanggulangan PIE (POLIO)
3	8a. Surveilans (SKD)	Ada beberapa petugas surveilans belum diberikan pelatihan, Terbatasnya petugas untuk publikasi	Perlunya pelatihan bagi petugas surveilans baru	Tidak tersedianya dana pembelian Pulsa pelaporan SKDR dan belum tersedia laptop dan pengikat PC di semua Puskesmas	Belum tersediannya dukungan anggaran khusus pengendalian Polio di Bulukumba	Website Publikasi belum ada

#### 4. Poin-point masalah yang harus ditindaklanjuti

1	Penolakan Imunisasi dari Masyarakat (Orang Tua Murid) Masih ada dan kebijakan local dari keputusan SKB 4 Menteri tidak mendapatkan tindak lanjut sektor terkait
2	Kurangnya sosialisasi lintas sektor terkait pelaksanaan penegndalian Kasus Polio di wilayah kabupaten dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi
3	Efisiensi Dana dilakukan terhadap kegiatan kegiatan di pengendalian Kasus Polio karena berdasarkan asumsi penganggaran bahwa tidak terdapat kasus sehingga tidak wajib dilaksanakan kegiatan kegiatan pegendalian.
4	Dukungan Pimpinan terhadap Anggaran hanya untuk anggaran pelasaan kewaspadaan dini saja.
5	Sebagian dari Anggota TIM TGC belum bersertifikat dan mengikuti pelatihan

#### 5. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	KEBIJAKAN	Membuat Surat edaran Bupati kepada seluruh pemilik Sarana Air Minum terkait kepatuhan pemeriksaan.	Pj. Pengawasan Kualitas Air di Dinkes	Agustus 2025	
2	DAMPAK	Mengusulkan Anggaran pengadaan Reagen Pemriksaan sarana air minum dan pengiriman sampel ke Laboratorium Rujukan	Pj. Pengawasan Kualitas Air di Dinkes	Agustus 2025	

3	Pelaksanaan	Melaksanakan sosialisasi Rutin imunisasi dan KIPI di daerah rendah cakupan imunisasi Polio	Pj. Imunisasi	September 2025	
4	DAMPAK	Mengusulkan Anggaran Sosialisasi Lintas sektor dan Monitoring Bulanan Program Imunisasi	Pj. Imunisasi	Agustus 2025	
5	SURVEILANS	Melaksanakan Pelatihan bagi petugas surveilans di Puskesmas dan RS	Pj. Surveilans	Agustus 2025	
6	SURVEILANS	Mengusulkan pengadaan Perangkat PC/Laptop operasional bagi petugas surveilans di Puskesmas	Pj. Surveilans	Agustus 2025	
7	SURVEILANS	Mengusulkan dana pembelian pulsa untuk pelaporan SKDR serta anggaran website publikasi penyebarluasan informasi	Pj. Surveilans	Agustus 2025	
			Pj. Program STBM	Agustus 2025	

#### 6. Tim penyusun

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Faizal Johar Pasmal, SKM.,M.Kes	Pengelola Surveilans	Dinas Kesehatan Kab . Bulukumba
2			
3			